

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Skripsi ini berjudul INRES dan Wacana Pemberdayaan Politik Masyarakat Desa Sambirejo Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen. Untuk mempermudah memahami judul agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan kekaburan dalam menyusun skripsi ini, maka penulis memandang perlu mengemukakan beberapa istilah yang digunakan dalam judul skripsi ini dengan memberikan penegasan dan batasan-batasan sebagai berikut:

1. Pemberdayaan Politik Masyarakat.

Istilah pemberdayaan masyarakat menurut Koesnadi Hardjo Soemantri adalah upaya sadar dan berencana menggunakan dan mengelola sumber daya secara bijaksana dalam pembangunan yang berkesinambungan untuk meningkatkan mutu hidup.¹

Esrom Aritonang menambahkan pemberdayaan sebagai usaha untuk mengembangkan kekuatan atau kemampuan(daya), potensi, sumberdaya masyarakat agar membela dirinya.²

Menurut Michael Rush dan Phillip Althaff mengartikan politik sebagai penyelesaian konflik atas persoalan-persoalan yang ada di

¹ Koesnadi Hardjo Soemantri, *Pemberdayaan masyarakat Berwawasan Lingkungan, (Dalam Muhammadiyah dan Pemberdayaan Rakyat)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hlm. 61

² Esrom Aritonang dkk., *Pendampingan Komunitas Pedesaan*, (Jakarta: Sekretariat Bina Desa, 2001), hlm. 9

masyarakat serta kebijakan-kebijakan yang didasarkan atas kekuasaan yang berpengaruh di suatu masyarakat.³ Masyarakat merupakan kelompok manusia yang saling terkait oleh sistem-sistem adat-istiadat ritus-ritus serta hukum-hukum khas dan hidup bersama.⁴

Dari uraian di atas yang dimaksud dengan Pemberdayaan Politik Masyarakat dalam pembahasan ini adalah upaya-upaya yang dilakukan untuk memecahkan berbagai macam persoalan-persoalan yang menyangkut kekuasaan dan kebijakan dalam kehidupan masyarakat dengan menggunakan sistem yang disepakati bersama masyarakat dengan menggunakan SDM yang dimiliki baik fisik maupun non fisik.

2. INRES (*Institute for Research and Empowering Society*)

INRES adalah sebuah lembaga non pemerintahan yang berbentuk yayasan, didirikan di Solo, Jawa Tengah, pada tanggal 10 Desember 1997 oleh sekelompok mahasiswa, sarjana dan santri.

INRES didirikan atas dasar keprihatinan para pendirinya terhadap kondisi sosial politik, sosial dan ekonomi rakyat yang terus ditindas oleh penguasa rezim Orde Baru di bawah kekuasaan presiden Soeharto.⁵

Berdasarkan penjelasan istilah-istilah tersebut, maka yang dimaksud judul INRES dan wacana Pemberdayaan Politik Masyarakat Desa Sambirejo Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen adalah usaha yang

³ Michael Rush dan Althaff, *Pengantar Sosiologi Politik*, Terjemah Kartini, (Jakarta: Rajawali, 1995), hlm. 2

⁴ Murtadha Murthahari, *Masyarakat dan Sejarah (Kritik Islam Atas Marxisme dan Teori lainnya*, Terjemah Murtadha Muthahari, (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 15

⁵ Modul INRES. (Solo: 2001)

dilakukan oleh INRES dalam mengupayakan kesadaran masyarakat dalam berpolitik yang menyangkut kekuasaan dan penegakan hak-hak dengan advokasi dan kebijakan terhadap sistem pemerintahan dalam membangun masyarakat yang mandiri dan berkeadilan terhadap sistem pemerintahan sekarang ini, sehingga masyarakat dapat melaksanakan program pemerintah dalam pembangunan dalam bentuk partisipasi masyarakat ditingkat lokal khususnya masyarakat di Desa Sambirejo, Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen.

B. Latar Belakang Masalah.

Dalam reformasi sekarang ini perlu sekali dibangun suatu sistem sosial yang baik dan terarah. Sehingga sangat penting untuk dibangun potensi SDM yang diharapkan dapat mengembangkan dan menghasilkan satu identitas yang berguna dalam kehidupan sosial kemasyarakatan untuk kemajuan suatu bangsa. Kondisi yang terjadi di dalam masyarakat sekarang ini merupakan fenomena tersendiri yang jelas dan praktis, sehingga perlu dikaji kembali kemaŕa arah pembangunan bagi masyarakat. Adanya proses pembangunan masyarakat yang dilaksanakan seharusnya sesuai dengan cita-cita untuk membentuk *Civil Society* (Masyarakat Madani).

Masyarakat madani sebagai ciri masyarakat yang mempunyai sistem dan struktur yang dapat mendorong moral masyarakat dan menjamin keseimbangan antara kebebasan dan kestabilan masyarakat secara global yang menyangkut institusi negara. Adanya masyarakat madani agar dapat berfikir

dan mandiri perlu dibina oleh lembaga-lembaga masyarakat terutama LSM yang mampu mendidik masyarakat menuju kemandirian. Keberadaan lembaga-lembaga kemasyarakatan merupakan salah satu cara yang dilakukan untuk membantu masyarakat agar berdaulat dan berstruktur sesuai dengan cita-cita masyarakat madani. Di kalangan LSM, Pers, dan aktivis mahasiswa sendiri mereka mencoba menjadi wadah dalam menampung dan menjawab kegelisahan-kegelisahan yang terjadi dalam masyarakat. Dengan menggali pola pikir kritis masyarakat dengan meningkatkan sumberdaya baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam yang diharapkan bisa menciptakan kondisi masyarakat dari tingkat rendah kearah kehidupan yang lebih baik. Jika dilihat masyarakat sekarang ini sebagai contoh masyarakat pedesaan sebagai komunitas masyarakat terkecil yang mengalami kebutaan dalam berpartisipasi terhadap kebijaksanaan dalam tingkat lokal. Hal ini terjadi karena masyarakat pedesaan masih dianggap masyarakat yang terisolir dan konservatif terhadap perubahan sosial yang terjadi.

Oleh karena itu LSM mencoba mengangkat pola pikir dan peran serta masyarakat pedesaan agar dapat menjadi warga masyarakat yang mandiri dan berdaulat tanpa terikat aturan-aturan yang mempengaruhi kurang berkembangnya suatu masyarakat dalam pembangunan.⁶ Pembangunan yang mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat akan berdampak pada perubahan sosial bagi masyarakat. Hal ini tak lepas dari proses keswadayaan dan pemberdayaan dari masyarakat itu sendiri yang sangat diperlukan menuju

⁶ *Jurnal Paramadina, Masyarakat Madani di Indonesia Sebuah Peninjauan Awal*, (Jakarta: Universitas Paramadina, vol I No 2 Tahun 1993), hlm. 23

masyarakat yang adil dan beradab. Dengan memberdayakan masyarakat diharapkan bisa mengacu pada pola pikir terhadap segala kegiatan yang sepenuhnya bersumber dari kemandirian dan inisiatif dari masyarakat untuk berbuat tanpa ada sesuatu yang tertutup dalam setiap kegiatan masyarakat.⁷

Perubahan dalam setiap kegiatan masyarakat sekarang ini diharapkan bisa membawa nilai lebih bagi masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara. Adanya pemerintah melaksanakan program otonomi daerah, merupakan satu program yang mengangkat pemberdayaan masyarakat dalam daerah. Program otonomi daerah memiliki sejumlah institusi politik yang berdiri sendiri yang akan dipergunakan untuk menyalurkan aspirasi masyarakat di daerah, sehingga masyarakat daerah dapat melakukan apa saja yang dapat meningkatkan kesejahteraan mereka atas dasar peraturan daerah masing-masing.⁸

Di dalam melaksanakan pembangunan daerah tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya birokrasi dari lembaga-lembaga legislatif dari pemerintah daerah, yang bisa mengatur dan melaksanakan bentuk pemerintahan di daerah yang adil dan merata. Birokrasi dalam sistem pembangunan tidak lain adalah mengendalikan dan mengubah sikap dari memberdayakan menuju arah yang lebih baik dari tertutup menjadi terbuka dan bertanggungjawab. Dengan merangsang semangat rakyat untuk berpartisipasi dalam program-program pembangunan dan mengembangkan

⁷ Andi Malarangeng dkk, *Otonomi Daerah Demokrasi dan Civil Society*, (Yogyakarta: FKMH, 2001), hlm.2

⁸ Affan Gaffar, *Otonomi Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat*, *Jurnal Perspektif* Vol 6. No. 2 1994. hlm 76

suasana kerakyatan dalam kehidupan baik politik, ekonomi maupun sosial budaya.⁹

Kehidupan sosial dalam masyarakat tak dapat berjalan tanpa adanya lembaga-lembaga dan tokoh-tokoh yang mampu membina masyarakat dari bawah menuju masyarakat yang memiliki hak-hak dan kewajiban. Ini sesuai dengan budaya yang ada di masyarakat tanpa menghilangkan budaya itu sendiri menuju masyarakat mandiri dan partisipatoris. Lembaga-lembaga yang berdiri di Indonesia berusaha membantu masyarakat untuk membentuk masyarakat yang aktif dan partisipatoris dalam pembangunan. Lembaga yang marak saat ini adalah LSM(Lembaga Swadaya Masyarakat) di mana lembaga ini membangun masyarakat madani dalam paradigma umum di Indonesia. Sekarang ini LSM sebagai penguat masyarakat dalam kehidupan bernegara, yang menyangkut kebijakan pemerintah dalam pembangunan. Fenomena ini berimplikasi memberi peluang bagi proses pergerakan yang baru bagi tumbuh dan berkembangnya masyarakat terutama ditingkat lokal. Gerakan-gerakan sosial yang merupakan basis bagi majunya rakyat secara besar-besaran yang sekarang ini sedang dilakukan LSM dengan ciri melaksanakan dalam ranah pengakuan(*the political recognition*) untuk hak-hak komunitas baik pengakuan politik maupun budaya yang berkaitan langsung dengan hak-hak kewarganegaraan dan membawa isu-isu dalam masyarakat yang bersifat lokal.¹⁰ Kehadiran UU No 22 Tahun 1999 memberikan wahana baru bagi

⁹ Mubyarto, *Ekonomi Rakyat Program IDT dan Demokrasi Ekonomi Indonesia*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1997), hlm. 78

¹⁰ *Kedaulatan Rakyat (KR)*, 1 Agustus 2003, *Gerakan Islam Lahirkan Feodalisme Baru*.

masyarakat untuk mengekspresikan hak-hak politiknya di depan publik, agar dapat mempertegas hak untuk berpartisipasi dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat ditingkat lokal dilaksanakan oleh LSM melalui pembentukan Forum warga yang mengangkat partisipasi serta menampung aspirasi rakyat secara terbuka. LSM membentuk sebuah forum warga yang membantu mengkonsolidasikan kekuatan masyarakat sipil, agar dapat membangun partisipasi politik mereka dalam pengambilan kebijakan ditingkat lokal. Dengan melihat keadaan masyarakat atas kebijakan daerah dan pemerintah sekarang ini. Oleh karena itu INRES sebagai LSM mencoba untuk membangun aspirasi masyarakat yang menyangkut pemberdayaan dalam bidang politik dengan membantu proses pembangunan masyarakat terutama di Sragen.

Dengan adanya INRES(*Institute for Research and Empowering Society*) sebagai lembaga yang berdiri di Solo dengan melakukan pendampingan terhadap Formas(Forum Masyarakat Sragen) yang menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat pedesaan. Masyarakat pedesaan sebaga salah satu faktor utama dalam mendukung adanya pembangunan. Roda reformasi yang sampai pada masyarakat pedesaan membuat kemajuan bagi masyarakat diberbagai bidang, sehingga membawa masyarakat untuk lebih aktif dalam setiap proses pembangunan. Di sini mengambil salah satu desa di Sragen yang dianggap masyarakatnya masih kurang mengetahui hak-hak dan kewajiban terhadap sistem peraturan pembangunan daerah yang di laksanakan di Sragen, sehingga kurangnya

aspirasi rakyat khususnya di Desa Sambirejo, Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen dalam menghadapi berbagai macam permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat Sragen pada umumnya mempunyai tekad untuk membangun daerahnya, agar sesuai dengan cita-cita masyarakat adil dan makmur. Hal ini menyangkut kebijakan-kebijakan dan peraturan dari pemerintah dan masyarakat yang diharapkan dapat bekerjasama dalam membangun bangsa. Melalui INRES diharapkan dapat membangun politik dalam masyarakat dengan politik bagaimana seni melayani dan memahami serta menghadapi berbagai macam persoalan di masyarakat.

INRES sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat mempunyai tujuan yang pada dasarnya tak lepas dari pengembangan demokrasi dan peningkatan partisipasi masyarakat di semua bidang dalam kehidupan sosial dan politik. Di samping itu INRES diharapkan bisa memberikan perubahan pada masyarakat dalam melaksanakan demokrasi baik ditingkat lokal maupun di tingkat pemerintahan. Dilihat dari aspek ekstern bahwa INRES melakukan pendampingan di Formas mengacu pada berbagai kelompok masyarakat dari kelompok masyarakat yang beragam permasalahan. Permasalahan yang ada dalam masyarakat yang dibahas terutama di bidang politik dan mengantisipasi adanya berbagai persoalan politik secara umum baik di pedesaan maupun di pemerintahan saat ini dengan mencoba memberdayakan politik masyarakat sejauh mana masyarakat bisa berpartisipasi di depan publik.¹¹

¹¹ Modul INRES

Dari latar belakang seperti di atas penulis tertarik untuk meneliti keberadaan INRES dalam melakukan pendampingan sekaligus penguatan partisipasi masyarakat dalam bidang politik. Dengan adanya Formas sebagai wadah aspirasi masyarakat diharapkan bisa menampung berbagai macam persoalan yang dihadapi dalam masyarakat yang menyangkut sistem kebijakan pemerintah dalam pembangunan. Pembangunan khususnya pada masyarakat Desa Sambirejo, Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen.

Lebih jauh ketertarikan penelitian didasari atas: Pertama, penelitian yang menyandingkan wilayah pemberdayaan politik yang sangat minim sekali bagi masyarakat secara umum.

Kedua, masyarakat Desa Sambirejo, Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen memiliki cara hidup yang masih konservatif terhadap perubahan sosial yang terjadi sehingga pemberdayaan terutama dalam masalah politik sangat minim sekali.

Muncul rasa penasaran penulis untuk meneliti karena INRES merupakan LSM yang sangat menarik untuk diteliti keberadaanya di masyarakat, sehingga secara obyektif peneliti dapat melihat secara langsung eksistensi INRES dalam melakukan pendampingan dengan wacana memberdayakan politik bagi masyarakat dalam proses pembangunan bangsa dewasa ini.

C. Rumusan Masalah.

Dari uraian di atas penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apa peran INRES (*Institute for Research and Empowering Society*) dalam memberdayakan politik masyarakat Desa Sambirejo, Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen?
2. Strategi apa yang digunakan INRES dalam pemberdayaan politik masyarakat Desa Sambirejo, Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen ?

D. Tujuan Penelitian

Sebagai sebuah kajian ilmiah penelitian ini tentu memiliki tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui konsep politik yang dikembangkan oleh INRES dalam pemberdayaan masyarakat desa.
2. Mengetahui aplikasi kegiatan politik INRES dalam pemberdayaan masyarakat pedesaan.

E. Kegunaan Penelitian.

1. Kegunaan Teoritis.

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wacana dalam dialektika kritis dalam memahami proses pemberdayaan politik masyarakat, sehingga pemahaman tentang dakwah yang terarah secara kontekstual satu diskripsi dakwah dalam kajian politik diharapkan memberi masukan terutama dalam kajian manajemen dakwah dan metodologi dakwah.

2. Kegunaan Praktis.

- a. Bagi mahasiswa, penelitian ini dapat dijadikan acuan data yang lebih komprehensif di dalam penelitian masalah yang ada dalam penelitian.

- b. Penelitian ini diharapkan memberi masukan secara obyektif bagi INRES sebagai pemberi dorongan bagi masyarakat dalam kesadaran berpolitik.

F. Telaah Pustaka.

Belum terdapat beberapa karya tulis yang membahas tentang pemberdayaan politik masyarakat melalui Lembaga Swadaya Masyarakat(LSM), baik yang berbentuk buku kumpulan tulisan maupun bentuk karangan. Maka dalam membahas judul ini berkaitan dengan buku-buku yang merujuk pada judul tersebut di atas. Nanih Machendrawaty dalam bukunya pemberdayaan masyarakat Islam dari ideologi strategi sampai tradisi mengemukakan bahwa pemberdayaan adalah suatu proses yang setidaknya sama dengan pengembangan bahwa masyarakat bisa memanfaatkan SDM sedemikian rupa hingga berdaya dengan potensi dan pemikiran yang mereka miliki.¹²

Berarti adanya pemberdayaan dapat dilakukan dengan melihat sisi non fisik serta kondisi lingkungan dari suatu masyarakat yang saling mendukung.

Selanjutnya menurut Michael Rush dan Phillip Althaff dalam buku pengantar sosiologi politik ia mengemukakan bahwa politik tidak lain adalah studi mengenai pemecahan persoalan manusia dengan mengembangkan pola pikir yang serta pengambilan keputusan dengan kekuasaan yang ada.¹³

¹² Nanih Machendrawaty, *Pengembangan Masyarakat Islam dari Ideologi Strategi sampai Tradisi*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001), hlm. 42

¹³ Ibid hlm. 5

Dengan melihat definisi politik di atas pada dasarnya landasan bagi sosiologi politik dibagi menjadi tiga yaitu:

1. Lingkungan kultural
2. Lingkungan politik.
3. Lingkungan masyarakat atau individu.

Kemudian di dalam bukunya John Clark yang diterjemahkan oleh Loekman Soetrisno yang membahas NGO dan Pembangunan Demokrasi menurut Loekman Soetrisno bahwa LSM merupakan organisasi non pemerintahan yang mempunyai kegiatan yang sifatnya menuntut pemerintah agar lebih demokratis dengan memberdayakan masyarakat supaya bisa berpartisipasi dalam pemerintahan dalam wujud yang konkrit.¹⁴

Kemudian menurut Sartono Kartodirjo dalam bukunya Duto Sosialismanto yang berjudul *Hegemoni Negara Ekonomi Politik Masyarakat Pedesaan Jawa* ia berpendapat bahwa LSM sebagai fasilitator, katalisator, organisator, di samping itu LSM juga sebagai pelengkap yang membantu pemerintah dalam proses pembangunan.¹⁵

Jadi yang menjadi tinjauan LSM dan pemberdayaan politik masyarakat tidak lain adalah suatu usaha yang berupa kegiatan dalam pendampingan terhadap masyarakat agar mampu berpartisipasi dalam proses pembangunan suatu negara. Adanya beberapa persoalan yang berada dalam masyarakat sekarang ini diharapkan masyarakat mampu menyelesaikan dengan kekuatan

¹⁴ John Clark, *NGO dan Pembangunan Demokrasi*, Terjemah Loekman Soetrisno, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1995), hlm. 1

¹⁵ Duto Sosialismanto, *Hegemoni Negara Ekonomi Politik Masyarakat Pedesaan Jawa*, (Yogyakarta: Laper Pustaka, 2001), hlm. 210

yang mereka miliki agar bisa sejalan antara keinginan pemerintah dengan masyarakat, sehingga terbentuk negara yang adil dan makmur sesuai dengan cita-cita masyarakat. Kaitanya dengan politik di sini pada dasarnya adalah politik dalam mengupayakan dan melakukan pengarahan terhadap masyarakat agar dalam kehidupan masyarakat terdapat dorongan untuk maju kearah yang lebih baik, LSM sendiri di sini melalui advokasi dan kebijakan agar masyarakat mampu berbicara di depan publik bukan sebagai masyarakat yang tertindas dan apatis tanpa mengetahui dan memperdulikan nasib bangsa dan negara.

Menurut Duto Sosialismanto dalam bukunya” Hegemoni Negara Politik Pedesaan Jawa” minimal ada dua faktor penting yang mendorong perwujudan ide-ide pembangunan alternatif dalam bentuk kelembagaan diluar birokrasi pemerintah di Indonesia.

1. Sebagai dampak dari faktor eksternal, polemik tentang teori-teori pembangunan telah mendorong lembaga-lembaga asing mengalihkan bantuan kegiatan kerakyatan dengan efisien di dunia ke tiga.
2. Faktor internal yakni pergolakan politik dalam strategi pembangunan dan pembebasan sistem militer.¹⁶ Dengan adanya beberapa tinjauan pustaka di atas maka sangat perlu di bangun suatu bentuk masyarakat yang bukan mandiri tapi juga masyarakat yang mengetahui perkembangan dan pengetahuan dalam menghadapi tantangan di masa yang akan datang.

¹⁶ Ibid hlm. 205

G. Landasan Teori

1. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Proses pembangunan bagi suatu negara tidak akan lepas dari bentuk-bentuk partisipasi terutama masyarakat sebagai warga negara. Mulai dikembangkan baik kreatifitas, pola pikir dan pandangan secara global kearah masa depan bangsa, dengan melihat banyaknya persoalan-persoalan yang terjadi pada masa sekarang ini maka perlu adanya peningkatan partisipasi masyarakat kearah lebih baik agar memiliki keswadayaan baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial dan lain-lain.

Pemberdayaan (*empowering*) sebagai satu pijakan bagi berkembangnya satu masyarakat yang mempunyai kajian tersendiri. Di mana pengarahannya lebih pada tujuan dan arti dari pemberdayaan masyarakat itu sendiri, sebab pemberdayaan membangun SDM agar lebih kompeten dan mempunyai arti tersendiri bagi berjalannya proses pembangunan dari suatu negara.

Istilah kata pemberdayaan sendiri secara leksikal berarti penguatan, dalam pengertian lain pemberdayaan mempunyai arti memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu sebagai bagian dari masyarakat menjadi lebih berdaya. Menganalisa masalah-masalah yang dihadapi dalam proses pemberdayaan merupakan prioritas bagi kepekaan dari masyarakat terhadap apa yang ada dalam lingkungan yang berhubungan dengan

partisipasi terutama dibidang politik.¹⁷ Pemberdayaan terhadap masyarakat terutama di pedesaan lebih ditekankan bagaimana melihat pola perkembangan SDM dengan mendidik masyarakat melalui kegiatan-kegiatan yang menggugah partisipasi masyarakat, sehingga cepat atau lambat masyarakat mampu membangun potensi diri baik dalam proses demokratisasi negara maupun dalam mencapai masyarakat yang membangun masyarakat itu sendiri. Dimana masyarakat bisa menjadi warga negara yang mempunyai kesadaran untuk mandiri.

Untuk itu konsep pemberdayaan politik pada masyarakat desa tidak lain dapat kita lihat pada perkembangan politik yang sangat ditekankan bukan pada demokratisasi saja yang menekankan pada satu parpol tapi juga menyangkut bagaimana peran politik bagi masyarakat pedesaan agar mampu menyelesaikan persoalan dengan sistem yang miliki dan mereka sepakati sesuai dengan aturan yang tidak menyimpang dari peraturan negara.

Strategi Penguatan masyarakat sipil yang di tujukkan untuk membentuk suatu masyarakat politik (*political society*) yang demokratis, partisipatoris dan reflektif. Di sini patut dikemukakan bahwa strategi pemberdayaan pada masyarakat sipil tidak selalu konfrontatif dengan negara, karena tidak ditujukan untuk merebut kekuasaan negara akan tetapi lebih diharapkan untuk menciptakan gradual dan evolusi suatu

¹⁷ Onny S Prijono dan AM Pranarka, *Pemberdayaan Konsep Kebijakan dan Implementasi*, (Jakarta: CSIS, 1996), hlm. 56-57

masyarakat politik yang semakin dewasa untuk mampu menyeimbangkan dan kontrol bagi kecenderungan ekksesif dari dominasi negara¹⁸.

2. Peran LSM dan Upaya Pemberdayaan Politik Masyarakat.

Fakta obyektif dewasa ini dunia LSM bukanlah dunia satu. Hal ini terjadi karena adanya keberagaman LSM dari yang berbasis ekonomi sampai politik, kiranya lebih tepat dijadikan sebagai pilar kekuatan dan bukan sebaliknya. Prinsip dasar yang tidak bisa ditolak adalah bahwa LSM dituntut dapat mematahkan stagnasi dan mengupayakan agar sejarah kembali bergerak, bagi kalangan LSM sendiri mempunyai dua tugas penting yang patut disongsong dalam membangun kondisi obyektif bagi demokrasi negara yaitu :

1. Ekonomi

Di sini LSM mencoba meninjau kembali dan membuat strategi pengembangan ekonomi rakyat dengan mengupayakan bantuan ekonomi, tanpa pertimbangan pada penguatan jaringan ekonomi rakyat yang pada dasarnya hanya memperkuat jaringan ekonomi monopoli. Tugas dari LSM dibidang ekonomi merupakan salah satu jaringan LSM dibidang kemiskinan yang terjadi atas kebutuhan masyarakat. Lepas dari ini LSM yang dibahas dalam permasalahan ini masalah ekonomi sebagai pijakan atas permasalahan sosial politik yang ada, sehingga kurang mendalam tekanannya dalam permasalahan di lapangan yang tidak terdapat pada bab berikutnya.

¹⁸ Duto Sosialismanto, Op.Cit hlm. 201

2. Politik.

Di sini LSM memberikan penguatan di masyarakat dengan upaya memberikan "pendidikan politik" dan mendorong lahirnya ormas di masyarakat. Dengan adanya ormas partisipasi masyarakat di harapkan dapat tersalurkan secara terarah.¹⁹ Politik sebagai salah satu topik yang sedang terjadi dalam masyarakat dewasa ini, sehingga diharapkan LSM lebih mampu dalam menentukan strategi politik bukan pada ekonomi karena ekonomi sebagai salah satu faktor yang menjadikan sistem perpolitikan yang menjawab atas permasalahan yang berada dalam masyarakat.

Dilihat lebih jauh lagi LSM sebagai pendamping bagi masyarakat yang mencoba membangun masyarakat menuju keswadayaan dan pemberdayaan paling tidak LSM menjadi pembelaan, pendamping dan penguatan bagi masyarakat bagi laju pembangunan kapitalis dewasa ini. Melihat kegiatan organisasi sosial politik yang belum mampu menyuarakan aspirasi rakyat dan membuat penderitaan yang dirasakan masyarakat desa semakin berat. Dengan melihat penderitaan yang dialami akibat dari sistem pemerintahan yang tidak stabil ini berakibat pada sikap masyarakat yaitu mendorong meluasnya kesadaran politik masyarakat yang berupa sikap kritis maupun sebaliknya acuh pada usaha –usaha pembangunan yang didominasi oleh negara.²⁰

¹⁹ Dadang Yuliantara, *Meretas Jalan Demokrasi*, (Yogyakarta: Kanisius, 1998), hlm. 183

²⁰ Ibid hlm. 206

Melihat lebih jauh tentang LSM Mansour Fakhri membagi LSM di Indonesia sebagai ideologi politik kedalam tiga tipe:

1. LSM Konformis: yang beerorientasi pada proyek dan bekerja sebagai organisasi yang adaptif dengan sistem dan struktur yang ada, sebagai contoh : membantu masyarakat tanpa berpikir gejala apa yang ada dalam masyarakat.
2. LSM Reformis: Mendasarkan pemikiran pada ideologi dan modernisme, developmentalisme. Dalam arti yang sebenarnya yaitu peningkatan partisipasi rakyat dalam pembangunan dengan metodologi yang bersifat top down dan bersifat non partisipatif, di sini LSM memfasilitasi dalam meningkatkan pengetahuan ketrampilan dan sikap untuk lebih modern serta mempunyai etos representatif dalam proses pembangunan.
3. LSM Transformatif: Sebagai alternatif dari dua tipe di atas yaitu paradigma modernisme dan developmentalisme yang menjadi *mainstream* dan ideologi yang tersembunyi di dalamnya.²¹

Dengan melihat keadaan dan ciri khas LSM di Indonesia maka pada LSM reformislah posisi INRES sebagai lembaga yang berkembang saat ini untuk mencoba memberikan penguatan dalam masyarakat terutama di Formas dengan melakukan kebijakan dan advokasi yang diimplementasikan dalam bentuk:

- a) Peningkatan kemampuan (*capacity building*)

²¹ Anas Urbaningrum, *Menuju Masyarakat Madani Pilar dan Agenda reformasi*, (Jakarta: Yarsif Watampone, 1999), hlm. 113-115

Partisipasi politik masyarakat agar dapat terlibat dalam proses perumusan kebijakan ditingkat lokal, dalam kerangka yang mendorong terbentuknya pemerintahan lokal yang bersih.

- b) Pengorganisasian masyarakat sipil dan kelompok prodemokrasi lainnya.
- c) Partisipasi dalam proses pengambilan kebijakan melalui advokasi kebijakan²².

Melihat LSM sebagai sebuah lembaga yang membantu pemerintah dalam pembangunan bangsa dan negara kiranya LSM bisa lebih dilihat bukan hanya sebelah mata tapi juga intensitasnya dalam membantu masyarakat.

3. Strategi LSM dalam Proses Pemberdayaan Politik Masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya adalah memberikan akses kontrol yang lebih besar dalam pembuatan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dan pelaksanaannya. Konsep kontrol klasik melalui mekanisme pemilihan umum dirasa sudah tidak lagi memadai, yang dibutuhkan adalah perbaikan konkret dari pemerintah dalam bentuk pelayanan yang baik dan bertanggung jawab. Maka akses kontrol bagi masyarakat kepada birokrasi penyedia layanan umum harus makin diperkuat agar aspirasi dan harapan masyarakat bisa ditanggapi secara lebih cepat. Sehingga terwujud apa yang menjadi cita-cita masyarakat secara

²² Modul INRES

berkesinambungan.²³ Dengan melihat kenyataan dewasa ini bahwa masyarakat mengalami penderitaan dalam proses pembangunan terutama bidang politik. Untuk itu perlu dirancang strategi dan aksi yang betul-betul mampu membebaskan masyarakat dari lubang ketidakberdayaan struktural yang mereka alami. Namun dalam hal ini perlu disadari bahwa program pemberdayaan mencakup strategi dan aksi sangat kompleks dan sarat nilai. Dalam merancang strategi dan aksi harus disertai mediasi dalam arena konflik seputar keputusan politik masyarakat.

Oleh karena itu strategi pemberdayaan yang dilakukan pada dasarnya adalah konsep bagaimana mengelola dan menggunakan sumber daya dan kekuasaan secara efektif sehingga kita bisa keluar dari dominasi ketidakberdayaan terutama dibidang politik.²⁴ Bagaimana langkah-langkah yang di ambil LSM dalam melakukan kebijaksanaan terhadap rakyat dengan membangun kebudayaan yang independen menghormati HAM dan demokratik juga strategis, pertama melakukan advokasi atas kasus-kasus yang dihadapi masyarakat, yang mengandung dua urgensi :

- 1) Memberikan nuansa perdebatan di ruang gagasan publik dengan kritik maupun protes dikalangan LSM, yang pada dasarnya akan memberi wacana baru dalam masyarakat.

²³ Lihat *Jurnal Wacana, Korupsi sengketa antara Negara dan Modal*, (Yogyakarta: Insist, Edisi 14 Tahun III 2002), hlm.98

²⁴ Lihat *Jurnal ISIP, Strategi Pemberdayaan Komunitas Lokal Menuju Kemandirian Daerah*, Volume 5, Nomor 2, November 2001, hlm.225

- 2) Memberi dukungan moral, yuridis maupun politik kepada rakyat yang mengalami represi. Diharapkan rakyat makin kritis sehingga dapat melakukan upaya-upaya hukum dalam mempertahankan hak-haknya.

Kedua melakukan promosi dan sosialisasi atas gagasan-gagasan pembaharuan. Di sini LSM ditantang untuk terus-menerus mengadakan penggalan terhadap gagasan yang kini berkembang dari sana, dengan menawarkan berbagai alternatif ²⁵

4. Pemberdayaan Masyarakat dalam Demokrasi dan Otonomi Daerah.

Pembangunan masyarakat yang berhubungan dengan permasalahan dan keadaan sosial politik masyarakat sebagai suatu kajian tersendiri. Jika kita lihat dari pemberdayaan politik masyarakat tidak lain adalah usaha atas permasalahan yang ada hingga timbul kesadaran dari dalam diri masyarakat untuk mencapai kemajuan dalam wujud partisipasi. Dengan memberikan ruang gerak dan pendidikan politik bagi masyarakat yang tidak melepaskan dari tanggung jawab sebagai warga negara atas dasar demokrasi. Hal ini terkait dengan birokrasi atas keseluruhan hak-hak rakyat sebagai sarana untuk memobilisasi kehidupan rakyat secara berkesinambungan.

Menciptakan dan menegakkan demokrasi dalam tata kehidupan kenegaraan dan pemerintahan yang saat ini sedang berjalan. Praktek pemerintah yang meletakkan kekuasaan terhadap masyarakat daerah untuk mewujudkan partisipasi mereka di depan publik sebagai sarana atas

²⁵ Ibid, hlm. 113-115

pendidikan politik. Pendidikan politik yang terdapat dalam demokrasi ini sangat berkaitan dengan adanya program pemerintah atas otonomi daerah. Di mana daerah terdapat permasalahan yang ada atas perwujudan dari aspirasi masyarakat dengan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat. Praktek dari pemerintah sendiri menentukan kebijakan atas daerah diwujudkan dengan peran dan aspirasi mereka dalam pembangunan melalui demokrasi atas partisipasi politik.

Menurut Syaukani dalam buku karangan Azyumardi Azra bahwa politik terjadi atas argumentasi bahwa pemerintah daerah merupakan kancha pelatihan (*Training Ground*) dari pengembangan demokrasi dari sebuah negara. Dengan ini pemerintah daerah akan menyediakan kesempatan masyarakat seluas-luasnya untuk berpartisipasi, sehingga dalam hal ini masyarakat sangat menentukan proses berjalannya kegiatan suatu daerah. Di dalam menjaring kegiatan-kegiatan dalam masyarakat yaitu melalui LSM yang memberi penguatan pada masyarakat dengan menggali pola kritis atas perjalanan demokrasi dan pembentukan pemerintahan daerah yang berjalan dengan baik dan terarah, sehingga pembangunan bagi suatu negara secara universal dapat mengangkat masyarakat dengan menopang sistem pemerintahan yang baik dan dapat terealisasikan pada program -- program yang dibentuk oleh LSM dalam rangka pemberdayaan masyarakat khususnya di pedesaan.²⁶

²⁶ Azyumardi Azra, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2000), hlm. 164.

H. Metode Penelitian

Metode memegang peranan penting dalam mencapai tujuan termasuk dalam penelitian. Di sini penyusun menggunakan metode sebagai berikut :

1. Penentuan Subyek dan Obyek Penelitian

Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai subyek penelitian adalah pengurus INRES (Khotibul Umam Wiranu), pendamping lapangan yang terdiri dari Ahsanul Minan, Agus Sumarsono dan masyarakat Desa yang terdiri dari kepala Desa Sambirejo Bapak Suparno dan Kepala paguyuban warga Bapak Karno beserta warga desa Sambirejo Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen yang terlibat dalam proses pemberdayaan dan partisipasi dalam berpolitik.

Selain subyek yang disebutkan di atas buku-buku, makalah-makalah dan jenis penerbitan, penulisan lain yang berkaitan dengan tema dijadikan sebagai subyek sekunder dalam penelitian ini. Sedangkan obyek dalam penelitian ini adalah konsep pemberdayaan dan pelaksanaan politik yang dikembangkan INRES di Sragen.

2. Wawancara (interview)

Merupakan cara pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan wawancara²⁷. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini bebas terpimpin, menurut Sutrisno Hadi dalam wawancara bebas terpimpin pewawancara membawa kerangka-kerangka pertanyaan untuk

²⁷ Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UII, 1986), hlm. 62

disajikan tetapi cara bagaimana pertanyaan diajukan dan irama wawancara sama sekali diserahkan kepada kebijaksanaan pewawancara²⁸. Wawancara ini diharapkan bisa berkembang karena dalam penyampaianya bersifat longgar tanpa keluar dari pedoman dari daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan. Dalam metode interview digunakan untuk mengumpulkan data mengenai kegiatan-kegiatan dan pemberdayaan politik yang dilakukan INRES terhadap masyarakat Desa Sambirejo Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen.

3. Metode Observasi

Metode observasi adalah metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan terhadap suatu obyek dengan menggunakan seluruh indera dan pencatatan secara sistematis.²⁹ Dalam metode ini penulis menggunakan data tentang usaha INRES yang berlangsung untuk mengamati pelaksanaan kegiatan pendampingan di Formas (Forum Masyarakat Sragen), serta partisipasi masyarakat dalam usaha mengembangkan apa yang mereka inginkan dalam sebuah forum. Dalam penelitian ini teknik observasi yang penulis pergunakan adalah observasi partisipan artinya pengamatan yang dilakukan secara langsung dengan melibatkan partisipasi penulis dan kegiatan yang dilakukan INRES yang berhubungan dengan permasalahan yang harus penulis teliti.

²⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: UGM, 1987), hlm. 193

²⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 146

4. Metode Dokumentasi

Metode ini digunakan sebagai penguat dari metode interview dan observasi untuk mengumpulkan data yang ada dalam dokumen mengenai gambaran umum proses terjadinya kegiatan yang berwujud partisipasi masyarakat Desa Sambirejo Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen dan INRES dari sejarah berdirinya sampai pada program-program yang dilaksanakan di Sragen disertai dengan laporan konfidensial yaitu suatu laporan yang ditulis setelah peristiwa itu terjadi.

5. Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan penulis adalah metode analisis deskriptif kualitatif berdasarkan atas data yang akan diteliti di lapangan, disertai metode deduktif yaitu mengambil dan menganalisis data yang bersifat umum yang terdapat bukti yang khusus yakni mengenai INRES dan aplikasinya dalam partisipasi dan pemberdayaan dibidang politik dalam pendampingan di Formas.

BAB IV

PENUTUP

B. Kesimpulan

Pembangunan bagi suatu bangsa merupakan modal utama menuju kemajuan dan masa depan bangsa yang lebih baik. Hal ini dapat dilihat dari sudut pandang Pertama, hubungan antara masyarakat dengan penguasa bisa sejalan. Kedua, kemampuan dari SDM dalam menggali dan membangun pribadi yang berkembang serta mengimplementasikannya dalam segala hal yang menyangkut hak asasi dalam proses pembangunan suatu negara.

Pada masa Orde Baru, di mana pembangunan merupakan gagasan yang paling penting yang menyangkut UU No 22 Tahun 1999 salah satunya menuju pemerataan pembangunan sampai kepedesaan dengan sistem Otonomi bagi Daerah. Maka perwujudan atas segala macam permasalahan yang berada dalam masyarakat merupakan jalan yang mengangkat rakyat dengan demokratisasi sebagai hasil atas pemunculan aspirasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Demokratisasi pada dasarnya merupakan sebuah perjuangan yang sangat panjang dan berat, untuk membangun sebuah tatanan masyarakat yang berdaulat dan masyarakat yang mandiri dengan proses perubahan yang terjadi.

Berbagai macam hambatan, persoalan, merupakan faktor yang memperlambat adanya demokrasi. Dalam hal ini perlu dibangun dinamika masyarakat yang mengangkat lembaga yang ada dari perkumpulan

masyarakat. Di mana forum ini bisa menampung dan memahami keinginan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. INRES sebagai NGO mencoba melihat kepada apa yang menjadi keinginan rakyat agar dapat bersuara di depan publik, dengan mengangkat masyarakat desa sebagai sasaran masyarakat yang perlu sekali untuk diberdayakan dan diangkat persoalan-persoalan yang membebaninya. Tujuan INRES melaksanakan penguatan masyarakat desa sambirejo melalui usaha-usaha yang ditampung dalam forum warga melalui pelatihan pengembangan politik rakyat yang menjadi salah satu dari program INRES, tanpa melihat keadaan masyarakat dari pedesaan yang dianggap a politis. Dengan membentuk forum warga bagi masyarakat Sragen (FORMAS) pada umumnya INRES mencoba membangun demokrasi masyarakat sipil di depan publik dengan kebijakan-kebijakan yang bercirikan atas wewenang dan hak yang dimiliki. Dalam melaksanakan beberapa langkah yang dapat menggerakkan suara masyarakat dengan melihat persoalan-persoalan yang berada di dalamnya dan terjun secara langsung. Perwujudan dalam melaksanakan demokrasi di dalam masyarakat Desa Sambirejo, Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen adalah dengan membuka wacana baru bagi masyarakat melalui penanaman demokrasi dan membuka forum dialog yang mengangkat berbagai macam persoalan yang berada dalam masyarakat secara kritis dan nyata perwujudanya, sehingga masyarakat bisa secara langsung mengetahui dan mendalami proses sistem demokrasi politik yang berada di daerahnya melalui cara:

1. Dengan melaksanakan diskusi forum warga yang diadakan satu bulan sekali.
2. Peninjauan terhadap keadaan masyarakat dan masalah yang sedang mereka hadapi.
3. Melaksanakan pendidikan demokrasi warga dalam rangka pelaksanaan demokrasi rakyat melalui pemilihan Kades (Kepala Desa) dan pemberian penyuluhan lewat media elektronik dan surat kabar di Sragen.
4. Melalui media massa yang dapat mendidik masyarakat secara langsung terhadap apa yang mereka hadapi dengan melihat dan mendengarkan pengarahan yang dilakukan dari pihak INRES, dengan begitu SDM sebagai pemantau kebijakan insidental.

Walaupun hal ini belum menghasilkan hasil yang optimal bagi pemberdayaan politik warga Sragen, setidaknya sedikit dapat membangun dan menggerakkan kebungkaman masyarakat kecil terutama masyarakat pedesaan terhadap proses pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur.

C. Saran-Saran

Dengan adanya pembangunan daerah di Sragen dan INRES yang telah melakukan pendampingan dengan membentuk FORMAS perlu ditindak lanjuti dengan pertimbangan sebagai berikut.

1. Bagi mahasiswa, Cendekiawan yang berdomisili di Sragen seharusnya melanjutkan pendampingan terhadap masyarakat dalam pembangunan dengan pendidikan bagi masyarakat dengan melihat faktor lingkungan

yang mungkin untuk di kembangkan, bukan sasaran atas ketidakadilan bagi penguasa.

2. Bagi Pemda Sragen setidaknya lebih membuat kebijakan atas peraturan-peraturan yang ada agar rakyat tidak memberontak
3. Perlunya dibangun dimensi Struktural dalam wujud bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat akan arti pentingnya berpartisipasi dalam sebuah negara dan oleh lembaga-lembaga yang berdiri di bawah pemerintahan.
4. Perlu dibangun organisasi masyarakat yang mencakup semua lapisan masyarakat agar dapat membangun masyarakat yang kritis, dinamis dan demokratis sehingga pembangunan dan perkembangan negara akan berjalan dengan cepat.
5. Adanya peraturan-peraturan Pemerintah yang dapat di pertanggungjawabkan tanpa merugikan rakyat dengan birokrasi yang adil dan merata.

DAFTAR PUSTAKA

- Aritonang, Esrom dkk, *Pendampingan Komunitas Pedesaan*, Jakarta: Sekretariat Bina Desa, 2001.
- A.M Pranaka dan Onny S. Prijono, *Pemberdayaan Konsep Kebijakan Dan Implementasi*, Jakarta : CSIS, 1996.
- Azra, Azyumardi, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2000.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta,1998.
- Budiharjanto, nicolous Teguh, *Memajukan Demokrasi Mencegah Disintegrasi (Sebuah wacana pembangunan Politik)*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1998.
- Clark, John, *NGO dan Pembangunan Demokrasi*. Yogyakarta:Tara Wacana, 1995.
- Hardjo Soemantri, Koesnadi, *Pemberdayaan Masyarakat Berwawasan Lingkungan, (Sebuah Pendekatan Hukum Lingkungan Muhammadiyah dan Pemberdayaan Masyarakat)* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*. Yogyakarta: UGM,1987.
- Mubyarto, *Ekonomi Rakyat Program IDT dan Demokrasi Ekonomi Indonesia*. Yogyakarta: Aditya Media,1997.
- Muthahari, Murtadha, *Masyarakat dan Sejarah Kritik Islam Atas Marxisme dan Teori lainnya*. Bandung: Mizan, 1998.
- Malarangeng, Andi dkk, *Otonomi Daerah Demokrasi Dan Civil Society*. Yogyakarta: FKMh, 2000.
- Machendrawaty, Nanih,*Pengembangan Masyarakat Islam Dari Ideologi Sampai Tradisi*.Bandung: Rosda Karya, 2001.
- Marzuki, *Metodologi Riset*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UII, 1986.
- Moelyarto, *Pembangunan Politik Sebuah Analisis Konsep arah Dan Strategi*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1995.
- Madjid, Nurcholish, *Cita-Cita Politik*. Jakarta: Paramadina, 1997.

Phillip Althaff Dan Michael Rush, *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Rajawali, 1986.

Sosialismanto, Duto, *Hegemoni Negara Ekonomi Politik Masyarakat Jawa*. Yogyakarta: Laper Pustaka, 2001.

Supriyatna, Tyahya, *Birokrasi Pemberdayaan Dan Pengentasan Kemiskinan*. Bandung: Humaniora Utama Press, 1997.

Triyono, Lambang, *Strategi Pemberdayaan Komunitas Lokal Menuju Kemandirian Daerah*. Jurnal ISIP Vol.5 No.2 November 2001.

Urbaningrum, Anas, *Menuju Masyarakat Madani Pilar Dan Agenda Reformasi*. Jakarta: Yarsif Watampone, 1996.

Yuliantara, Dadang, *Meretas Jalan Demokrasi*. Yogyakarta: Kanisius, 1998.

Modul INRES

Modul FORMAS

Jurnal perspektif, *Otonomi Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: ISSN. Vol 6.No 2, 1994.

Jurnal Islam Paramadina, "*Masyarakat Madani di Indonesia: Sebuah Penjajagan Awal*". Vol 1 No 2 Tahun 1993.

Jurnal Wacana, *Korupsi Sengketa Antara Negara Dan Modal*. Yogyakarta: INSIST Edisi 14, Tahun III, 2002.

Jurnal ISIP, *Strategi Pemberdayaan Komunitas Lokal Menuju Kemandirian*. Vol 5, No 2, November, 2001.

Kedaulatan Rakyat (KR), *Gerakan Sosial Lahirkan Feodalisme Baru*. Yogyakarta: 1 Agustus 2003